

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi adalah mesukseskan suatu program seperti pengertian implementasi menurut Grindle menjabarkan bahwa:

“implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.”²²

Menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan²³.

a) Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu

²²Akib, Haedar, 2010, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar (Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.1 Thn 2010)

²³Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third world*, 1980. Hlm 6.

kebijakan yang didalamnya memberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijakan diantaranya ialah :

1) Model Implementasi menurut Sabatier

Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down dan bottom up.²⁴

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

“(1) Karakteristik dari masalah ; (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang; (3) Variabel lingkungan “²⁵

kelompok-kelompok variabel tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah implementasi dengan adanya keterkaitan maka tujuan implementasi akan terlaksana dengan baik. Dan didalamnya ada tiga variabel yaitu:

Karakteristik Masalah:²⁶

Yang pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang

²⁴Sabatier, Paul. 1986. “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.

²⁵²⁵Drs. Ag Subarsono Msi, Ma, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi* Hlm.94

²⁶.,Ibid,..Hlm 95-98

diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Yang kedua, tingkat kemajuan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Ketika tingkat proporsi kelompok makin besar maka tingkat keberhasilan semakin sulit.

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh implementasi Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sulit diimplementasikan karena mengangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Yang kedua karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jadi dalam karakteristik

kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah

Lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan.

Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Jadi kejelasan dalam sebuah aturan atau regulasi sebuah kebijakan dan konsistensi bshwa kebijakan harus didasari dengan kejelasan dan konsistensi.

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program. Dalam hal ini pelaksana atau aparatur melaksanakan kebijakan harus bersih dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan program yang ada

Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya ada wilayahnya

Yang ketiga lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

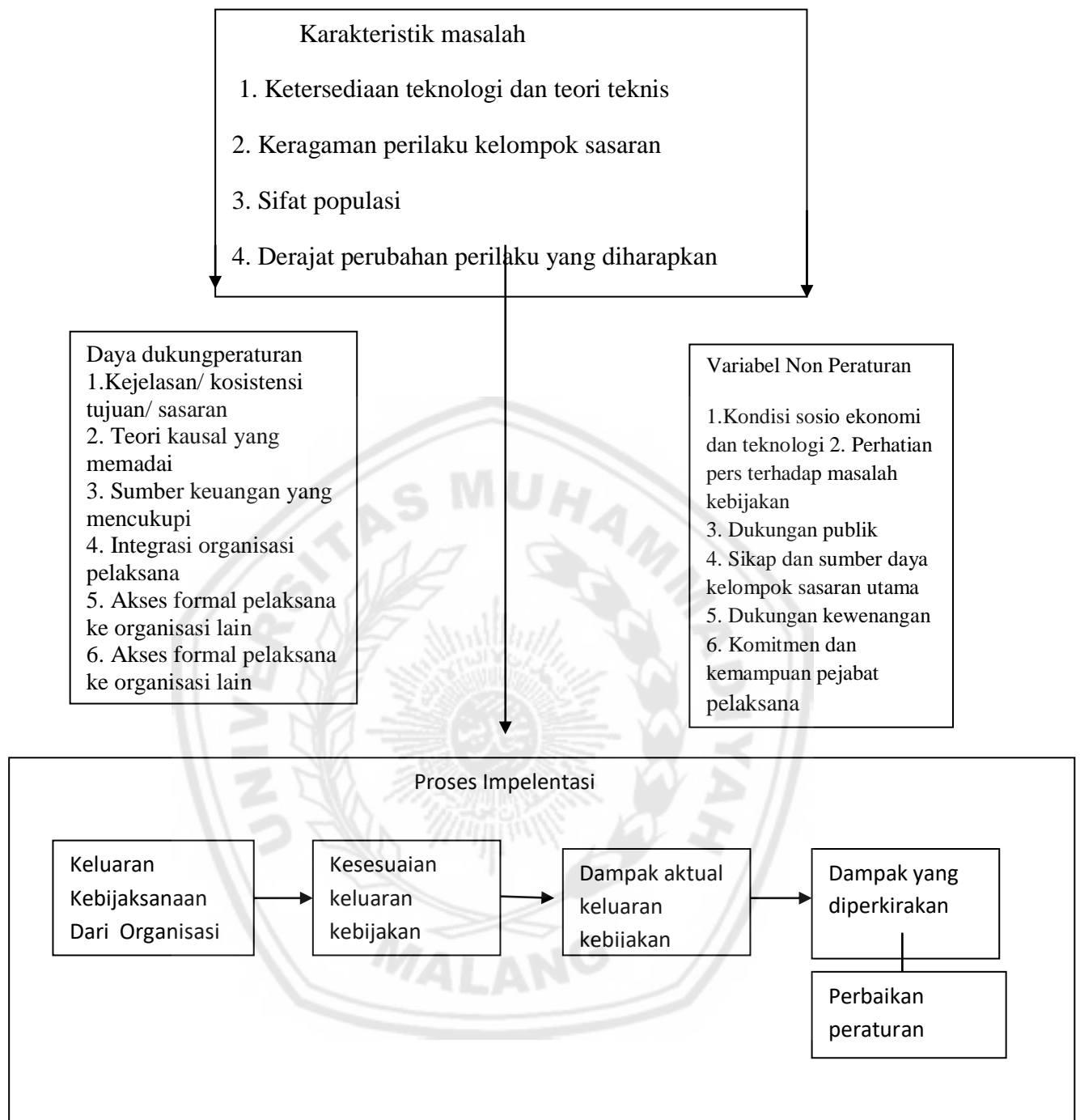
Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. Dalam hal ini dukungan publik lebih memilih kebijakan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Sikap kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan

terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

Selanjutnya tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tetuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Selanjutnya adalah model yang dikemukakan sabatier dan mazmanian digambarkan dengan sebuah gambar tentang beberapa faktor dalam yang disebutkan diatas yaitu karakteristik masalah yang akan dditarik dimana ada indikator-indikator dalam karakteristik masalah yaitu dukungan peraturan dan variabel non peraturan dan akan dijelaskan bagaimana proses implementasi menurut sabatier dan mazmanian.

Di bagan tersebut akan dijelaskan bagaimana tentang karakteristik masalah dalam sebuah kebijakan, misalnya ketersediaan teknologi dan teori teknis lalu, sifat populasi dan derajat perubahan perilaku yang diharapkan, lalu dalam teori kebijakannya ada daya dukungan dalam sebuah kebijakan diantaranya kejelasan/konsistensi/tujuan/sasaran lalau adanya teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi lalu integrasi organisasi pelaksana, akses formal pelaksana ke organisasi lain dan yang terakhir akses formal pelaksana ke organisasi lain. Dan ada beberapa variabel non peraturan yaitu kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan politik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, dan yang terakhir komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.



Bagan Model 2.1 Implementasi kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian

Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier,Paul A,12

a. Model Implementasi Merilee S.Grindle

Dalam implementasi model Merilee S.Grindle menekankan dengan beberapa variabel untuk mencapai keberhasilan sebuah implementasi dan tingkat

keberhasilan mencakup indikator variabel tersebut antara isi kebijakan dan lingkungan kebijakan isi dalam kebijakan apakah sudah sesuai atau tidak dan lingkungan kebijakan apakah mendukung atau tidak proses keberhasilan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle²⁷

“ dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada gambar variabel isi kebijakan ini mencakup²⁸”:

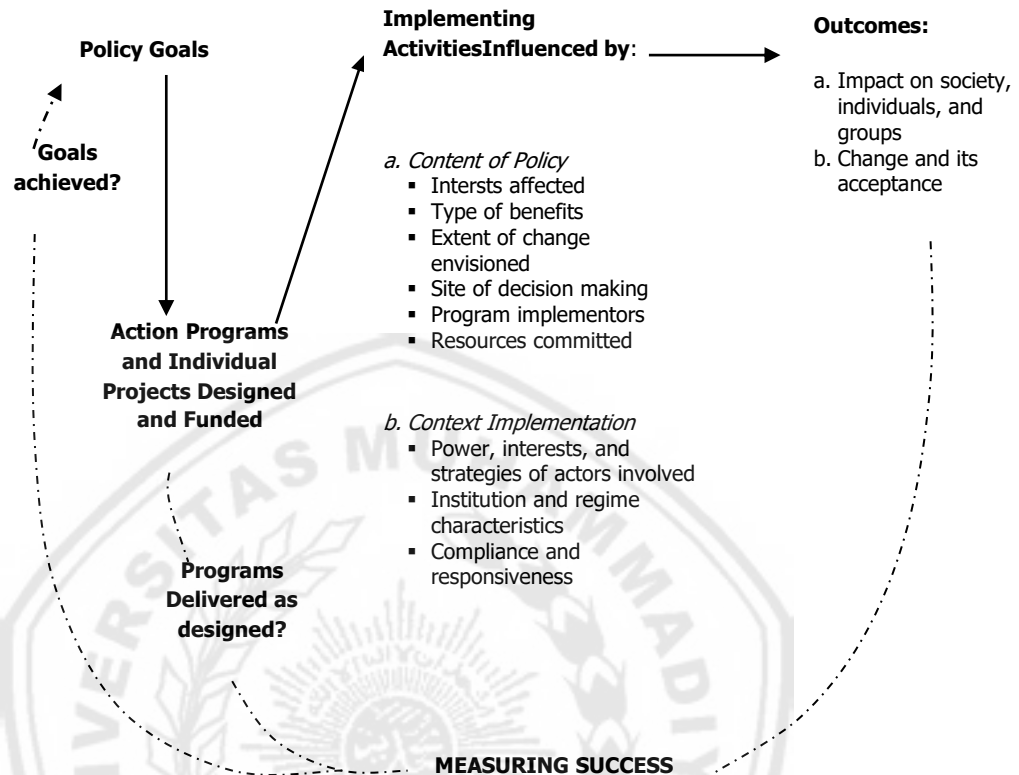
Dalam konteks isi kebijakan menurut Grindle yaitu 1)sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group sebagai contoh masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor ; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; 4) apakah letak sebuah program yang sudah tepat.Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga pra sejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN; 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan 6)apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat

²⁷Drs. Ag Subarsono Msi, Ma, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi* Hlm.93

²⁸Ibid.,Hlm 93

dalam implementasi kebijakan ; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa ; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Bagan. 2.2 Implementation as a Political and Administrative Process

Sumber: Akib, Haedar dan Tarigan Antonius, (2008), Hlm. 7

b. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Selanjutnya adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana mereka memaparkan variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi tersebut seperti yang diungkapkan, variabel tersebut sangat penting dalam kinerja sebuah implementasi.

Menurut Meter dan Horn,²⁹ ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni; “1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumberdaya ;3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; 4) karakteristik agen pelaksana ; dan 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik”.

²⁹Drs. Ag Subarsono Msi, Ma, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi* Hlm.99

Variabel-variabel tersebut merupakan indikator penting dalam setiap kebijakan yang ada sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan diselaraskan melalui indikator tersebut agar kinerja kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :³⁰

Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Jadi keberhasilan suatu kebijakan diukur dengan tujuan yang jelas setiap kebijakan akan berhasil jika setiap formulasi kebijakan memiliki tujuan yang jelas.

Kedua, sumberdaya keberhasilan proses implementasi kebijakan itu sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, jika pemanfaatan sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik maka, keberhasilan setiap kebijakan bisa tercapai, sumber daya menjadi sisi pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan

Ketiga, karakteristik agen pelaksana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

³⁰Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154.

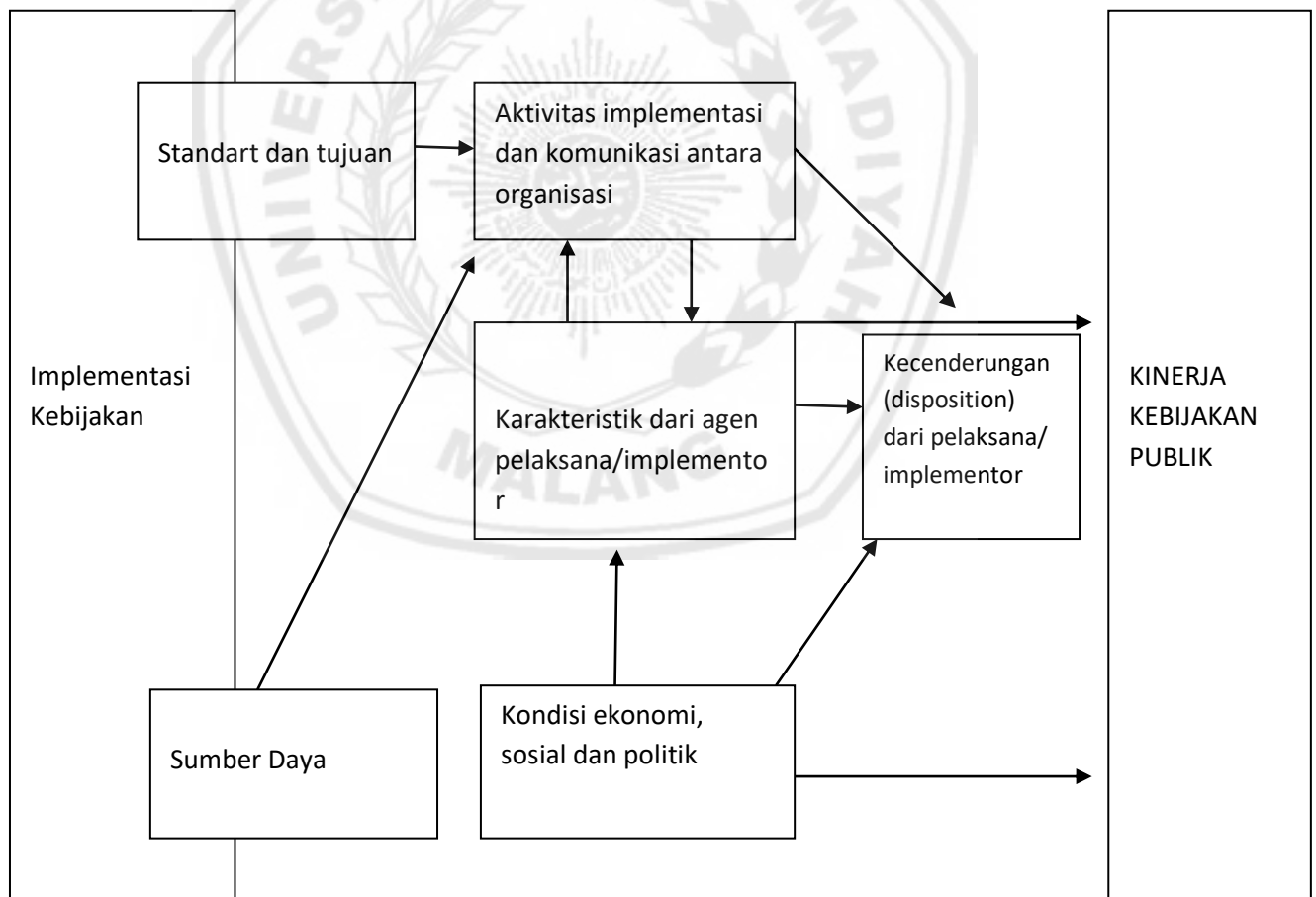
Keempat, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Jadi kita dapat melihat bagaimana sikap pelaksana dalam setiap kebijakan yang dibuat apakah dapat mendukung atau tidak.

Kelima, Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi antar organisasi menjadi kerjasama dalam memperoleh tujuan kebijakan.

Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dalam model implementasi menurut Van Meter dan van Horn bahwasanya ada beberapa variabel dalam mempengaruhi kinerja tersebut beberapa variabel dapat dilihat dan menjadi hal yang penting dalam sebuah kinerja agar dapat terlaksana dengan baik.

Dalam metode-metode yang ada bahwa pelaksanaan atau implementasi harus sesuai dengan metode yang ada, agar setiap pelaksanaan dapat berjalan

dengan baik, adanya pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, dalam metodenya tujuan dan arah kebijakan merupakan hal penting, karena setiap dibuatnya sebuah kebijakan akan memberikan dampak positif dan dapat menacapai tujuan agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik.lalu adanya sumber daya yang memadai juga menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan, selanjutnya komunikasi antar oorganisasi juga dapat memberikan relasi antara pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan kebijakan, jika pelaksanaan komunikasi dilakukan dengan baik maka kebijakan akan terlaksana dengan baik.



Bagan 2.3 Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber: Riant Nugroho, 2003:168

c. Model Implementasi oleh George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

“Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : “1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. Keempat variabel saling berhubungan satu sama lain³¹”.

Keempat variabel tersebut sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi dimana ada komunikasi antara pemerintah dan lainnya sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan agar keberhasilan kebijakan tercapai.

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi

Dalam implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi faktor –faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam sebuah implementasi yaitu yang dikemukakan oleh teori George C. Edwards yang didalamnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi. Dan Merilee S. Grindle juga mengemukakan faktor terkait keberhasilan kebijakan, faktor-faktor tersebut menjadikan kebijakan lebih baik, bagaimana mengatur dan memposisikan hal hal yang menjadi indikator dalam sebuah keberhasilan tujuan kebijakan.

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), the are for critical factories to policy implementation they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic

³¹Drs. Ag Subarsono Msi, Ma, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi* Hlm.90

structure”.³²

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain yaitu³³

Pertama, Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran target (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Kedua, Sumberdaya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja

Ketiga, Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki posisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika Implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

³²Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 154.

³³Ibid., hlm 90-92

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Struktur Birokrasi struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedure) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Diatas kita sudah melihat bagaimana faktor yang telah dikemukakan oleh George C. Edwards III sekarang kita Faktor keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar.

” yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).”³⁴

Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat atau ditransformasikan kedalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh

³⁴*Ibid*, Hlm 8

sumberdaya yang memadai.³⁵Isi kebijakan (*content of policy*) tersebut dipengaruhi oleh:

Pertama kepentingan yang di pengaruhi oleh adanya kebijakan/program;Theodore Lowi mengungkapkan jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut..

Kedua, jenis manfaat yang dihasilkan dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh kelompok sasaran sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Program yang memberikan manfaat kepada banyak orang akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari kelompok sasaran. Jadi jenis kebijakan yang memiliki manfaat untuk masyarakat akan lebih mendapat dukungan daripada kebijakan yang memojokkan masyarakat, misalnya saja kebijakan pembagian sertifikat tanah secara gratis lebih didukung daripada kebijakan menaikkan BBM.

Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi kelompok sasaran yang cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Yaitu kebijakan jangka panjang bahwasanya kebijakan tersebut

³⁵*Op Cit*, Subarsono, Hlm. 93

dalam kurun yang pendek tidak terasa dampaknya tetapi dalam rencana jangka panjang dapat terasa keberhasilan kebijakan tersebut.

Keempat, kedudukan pengambil keputusan Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Yaitu aktor di dalam kebijakan mereka menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan, jika banyaknya pengambil keputusan maka akan sulit tercapainya pelaksanaan jadi harus terpusat.

Kelima, (Siapa) pelaksana program kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program. Jadi keberhasilan suatu program kebijakan ditentukan oleh kinerja aktor dalam pelaksanaan program tersebut, aktor pelaksana harus mempunyai kapabilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan

Keenam, sumber daya yang dihasilkan. Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik yang lebih baik. Jika sumber daya yang ada dapat mendukung keberhasilan program maka dikatakan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan program kebijakan tersebut.

Sementara itu, konteks implementasinya (*context of implementation*) adalah:

Pertama, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

Kedua, karakteristik lembaga dan penguasa, implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan siapa mendapatkan apa. Konflik-konflik yang terjadi merupakan sebuah kepentingan lembaga-lembaga tertentu dalam suatu implementasi kebijakan jadi harus memonitoring pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi perselisihan antar lembaga.

Ketiga, tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan penerima program (kelompok sasaran). Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

Nakamura (dalam Solichin A. Wahab, 1997:43) merekomendasikan lima kriteria keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan yaitu:

Pertama, Pencapaian tujuan atau hasil suatu kebijakan atau program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan tetapi hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat maka program tersebut tidak ada artinya.

Kedua, Efisiensi memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan saja berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan sumberdaya yang digunakan. Dengan demikian suatu program dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan.

Ketiga, Kepuasan kelompok sasaran kriteria kepuasan kelompok sasaran sangat menentukan bagi keikutsertaan maupun respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan program dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan maka program tidak akan mempunyai arti penting bagi kelompok sasaran.

Keempat, Daya tanggap klien dengan daya tanggap positif maka dapat dipastikan peran serta mereka akan meningkat. Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini berarti kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan.

Kelima, Sistem pemeliharaan artinya dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinyu maka betapapun baiknya suatu program atau hasil akan dapat berhenti manakala bentuk nyata dari program tersebut selalu memudar.

c) Aktor-aktor dalam Implementasi

Dalam sebuah implementasi kebijakan ada aktor-aktor yang terkait dalam kebijakan tersebut beberapa aktor fungsinya sangat penting dalam efektifitas implementasi, aktor-aktor tersebut memiliki fungsi masing masing dalam rangka mencapai tujuan di atas, maka aktor-aktor pembangunan.

Menurut Syahrir ³⁶ memiliki peran sebagai berikut:”(1) Pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (Policy) yang memihak pada community; (2) Swasta. Membuat program yang integrasi dengan pembangunan komunitas dengan cara memberikan pelatihan atau kegiatan magang dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal; (3) Masyarakat atau Komunitas”.

Keterkaitan antara aktor-aktor dalam implementasi sangatlah ketergantungan karena pemerintah menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan serta beberapa aktor pendukung yang sama pentingnya dalam melaksanakan sebuah kebijakan tanpa adanya aktor-aktor ataupun kurangnya beberapa aktor maka implementasi tidak dapat berjalan dengan baik.

d) Tahap-tahap Implementasi

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Policy Implementation*, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu :

1. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (*Formulation*),
2. Lingkungan penerapan (*Implementation*), dan
3. Lingkungan penilaian (*Evaluation*) kebijakan.

³⁶Syahrir (2004). *Kemitraan Di Era Otonomi Daerah*. Modul Materi Bintel Kemitraan Otonomi Daerah. Jakarta.Hlm., 5Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik adalah :

“Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (*A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals*). Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi” (Nakamura, 1980:31).

Dalam tiga tahapan implementasi tiga-tiganya sangat penting dalam implementasi tanpa formulasi kebijakan tidak akan lahir tanpa implementasi pelaksanaan tidak akan terlaksana dan tanpa evaluasi pengevaluasian tidak akan memberi perbaikan dalam implelementasi, maka ketiganya menjadi dasar pokok dalam tahap implementasi.

B. E-Procurement

E-Procurement merupakan pengadaan barang secara eletronik yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi, dimana E-Procurement menjadi sebuah akses yang memberikan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Menurut Willem pengadaan secara elektronik (e-Proc)

“merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI)”.³⁷

Sedangkan pengertian lain menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 13 TAHUN 2011³⁸.

“e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi

³⁷ Willem, Siahaya. *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung. 2012, Alfabeta Hlm 80.

³⁸ Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bab I pasal 13 hlm. 2

pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE melalui www.malangkota.go.id.”

1. Tujuan E-Procurement

Dalam sebuah kebijakan khususnya kebijakan E-Procurement kebijakan E-Procurement memiliki tujuan-tujuan yang akan memberikan dampak bagi kebijakan tersebut.

Tujuan E-procurement sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Meningkatkan transparansi dan akutanbilitas.
- c. Memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi.
- d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan jasa dan konstruksi.
- e. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi.
- f. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamn terselenggaranya komunikasi secara online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

2. Manfaat E-Procurement

Dalam kebijakan E-Procurement manfaat-manfaat yang didapat bagi pemerintah maupun masyarakat memberikan arti positif Purwanto memberikan pendapat bahwa paling tidak terdapat delapan manfaat penerapan e-procurement tersebut yaitu:³⁹

“a) biaya transaksi yang lebih rendah. b) pemesanan yang lebih cepat. c) pilihan terhadap vendor yang lebih luas. d) proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang lebih efisien. e) kontrol yang lebih baik terhadap proses pengeluaran pengadaan barang dan tingkat kepatuhan pegawai yang lebih baik. f) menyediakan akses internet yang lebih luas kepada pembeli. g) kertas kerja yang lebih sedikit dan mengurangi pengulangan prosedur administratif. h) membantu penyusunan ulang terhadap proses pengadaan barang”.

³⁹Purwanto; Ibtu, et.al. (2008) *E-Procurement Di Indonesia*. Jakarta, Kemitraan Partnership. Hlm.16

Berikut adalah beberapa manfaat dari E-Procurement yang memberikan dampak positif dan diselaraskan oleh beberapa ahli seberapa manfaat atau besar kah dampak kebijakan E-Procurement .

Sedangkan menurut Percy manfaat E-Procurement⁴⁰ adalah :

“a) kemampuan sebagai mekanisme integrasi baik di dalam perusahaan maupun dengan supplier. b) e-procurement juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok.c) mengurangi kebutuhan personel. d) meningkatkan koordinasi.e) mengurangi biaya transaksi.f) siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek.g) tingkat inventarisasi yang lebih rendah dan transparansi yang lebih besar”.

Menurut kedua pernyataan ahli tersebut dikatakan bahwa E-Procurement memberikan dampak positif dan memberikan sebuah efektifitas,efisiensi serta pertanggung jawaban dalam kebijakan E-Procurement, memberi sebuah kebaikan dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

3. Tahapan Pelaksanaan E-Procurement

Tahapan-tahapan pelaksanaan E-procurement memiliki beberapa tahapan yang didalamnya terdapat metode dalam kegiatan e-Procurement terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem⁴¹ yaitu” :

- a. E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
- b. E-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil

⁴⁰Percy; Dawn H, et.al. (2008) “Using Electronic Procurement to Facilitate Supply Chain Integration: An Exploration”. American Journal of Business. V 23 (1) Dalam Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh, Wima Yudo PrasetyoJurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2

⁴¹Willem, Siahaya. (2012)*Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung. Alfabeta Hlm 8

pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).

- c. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- d. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-Catalogue.

4. Prinsip E-Procurement

Dalam sebuah kebijakan maka ada beberapa prinsip sebagai acuan pelaksanaan yang berpegang teguh pada prinsip. Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut adalah⁴² :

Pertama, efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Kedua, efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

⁴²Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketiga, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Keempat, terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Kelima, bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Keenam, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sumber Hukum Pelelangan

Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Peraturan-peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan:

- a. Keppres No. 14A tahun 1980, tanggal 14 April 1980
- b. Keppres No. 18 tahun 1981, tanggal 5 Mei 1981
- c. Keppres No. 29 tahun 1984, tanggal 21 April 1984
- d. Keppres No. 16 tahun 1994

- e. Keppres No. 6 tahun 1999
- f. Keppres No. 18 tahun 2000
- g. Keppres No. 80 tahun 2003
- h. PerpresNo. 54 tahun 2010
- i. Perpres No. 4 tahun 2015
- j. Perpres No. 16 tahun 2018

C. Pengukuran Implementasi Kebijakan E-Procurement

- a) Transparansi Kebijakan E-Procurement di Kota Malang.

Transparan⁴³, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, jadi pengukuran implementasi kebijakan dilihat dan diteliti dari informasi yang didapatkan ditempat penelitian

- b) Proses Pelaksanaan E-Procurement di Kota Malang.

- c) Proses Monitoring dan Audit E-Procurement di Kota Malang.

Dalam proses monitoring LPSE dan SPSE selaku lembaga yang menangani proses penghitungan atau audit akan dikerjakan oleh sistem-sistem aplikasi E-Procurement sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengertian E-Government

E-Government adalah sebuah sistem pemerintah yang berbasis elektronik dimana setiap proses yang berkaitan dengan pemerintah dapat dilaksanakan dan prosesnya melalui sistem elektronik dan memberikan dampak yang lebih efisien terhadap masyarakat. Masyarakat dan pemerintah diberi kemudahan akses proses

⁴³Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

birokrasi yang semakin mudah, maka dari itu terciptanya E-Government selaras dengan pendapat Menurut Indrajit⁴⁴

“E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”. E-Government adalah “penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif”. Dimana pada intinya E-Government adalah “penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain)”.

Jadi dengan pendapat indrajit bahwasanya memiliki keselarasan dengan pendapat lain tentang E-Government menurut Mustopadidjaja⁴⁵,

“E-Government, juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara.”

Dari rumusan pengertian tersebut di atas jelas bahwa e-adm (e-gov) merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi pemerintahan; (2) memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (3) memberikan akses informasi kepada publik secara luas; dan (4) menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat.

Indrajit⁴⁶ mengatakan, berbeda dengan definisi E-Commerce maupun E-Business yang cenderung universal, E-Government sering digambarkan

⁴⁴Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. ANDI.Yogyakarta. Hlm.36

⁴⁵Mustafadidjaya, AR (2003) *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: (SANKRI), LAN.

⁴⁶Ibid.,Hlm

atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

Pertama, walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip –prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup E-Government pun menjadi beraneka ragam;

Kedua, spektrum implementasi aplikasi E-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;

Ketiga, pengertian dan penerapan E-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan;

Keempat, visi dan misi strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

E. Konsep E-Government

Dalam hubungan antara Kebijakan E-procurement dengan konsep E-Government terdapat konsep-konsep yang merujuk pada hubungan Pemerintah terhadap peran lainnya. Dan dapat diselaraskan dan, kemudian konsep tersebut

dikembangkan lagi dengan 4 (empat) relasi yang mempengaruhi dalam pengembangan aplikasi-aplikasi pelayanan didalamnya Indrajit⁴⁷, yaitu:

Pertama, model G2G (Government to Government) tersebut menyebutkan relasi antara pemerintah dan pemerintah yang disebutkan oleh indrajit bahwa:

“Interaksi ini bertujuan untuk membuka saluran komunikasi antar sektor pemerintah, sehingga dapat bekerjasama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bisnis, dan diharapkan agar pemerintah dapat menjadi lebih proaktif dalam menghadapi tantangan.”⁴⁸

Relasi pemerintah ke pemerintah memberi arti kerjasama yang dilaksanakan oleh si pembuat kebijakan dan memberi dampak dalam sebuah kebijakan, maka pemerintah memberikan sebuah bentuk kerja sama antara pemerintah yang dimaksudkan antara lembaga yang bertujuan untuk memudahkan dan memberi dampak positif bagi pemerintah itu sendiri.

Kedua, ialah (Government to Business) dimana pemerintah bekerja sama dengan swasta dalam urusan mencapai tujuan masing masing dan berdampak pada keduanya yang diungkapkan oleh indrajit yaitu :

“Interaksi ini diharapkan pihak pemerintah dan swasta dapat memanfaatkan internet sebagai sarana untuk bertukar informasi dan yang terpenting juga sebagai sarana efektif untuk melakukan bisnis.”⁴⁹

Seperti yang diungkapkan indrajit bahwasanya pemerintah dan swasta memberikan dampak ataupun kepentingan bersama dalam sebuah kebijakan.

Ketiga, yaitu G2C (Government to Citizens) yang artinya pemerintah memberikan relasi dengan masyarakat dan masyarakat memperoleh bentuk kerjasama yang sama sama menguntungkan sesuai dengan pendapat indrajit yaitu:

⁴⁷Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. ANDI.Yogyakarta.Hlm. 41.

⁴⁸Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. ANDI.Yogyakarta.Hlm. 41

⁴⁹Ibid., hlm 42

“Interaksi ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan secara cepat, murah, dan mudah setiap saat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam membangun dan meningkatkan trust masyarakatnya terhadap pemerintah”⁵⁰.

Dengan adanya interaksi dan relasi dengan pemerintah maka akan selaras dengan tujuan kebijakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat, akan memberikan dampak yang positif dan membentuk sebuah relasi dimana masyarakat akan membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keempat, G2E (Government to Employees) relasi antara G2E (Government to Employees) dimana pemerintah memberikan pengawasan dan kemudahan terhadap pegawai dalam pelaksanaan kebijakan serta kesejahteraan sesuai dengan kinerja pegawainya dan selaras dengan pernyataan indrajit bahwa :

“Disini dapat diciptakan aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja di dalam institusi sebagai pelayan masyarakat. Aplikasinya dapat berupa sistem pengembangan karir pegawai, maupun juga sistem asuransi kesehatan yang terintegrasi secara keseluruhan”⁵¹.

Dengan adanya hubungan antara pemerintah dan pegawai maka kinerja dalam sebuah kebijakan akan semakin mudah dan tercapai, pemerintah sebagai lembaga dapat melakukan kerjasama melalui pegawainya, dengan cara saling memberi reward ataupun bonus untuk pegawainya agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar

F. Hubungan E-Government terhadap kebijakan E-Procurement

Dengan adanya konsep E-Government to Business, transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan pemerintah dan swasta serta pemerintah menyediakan

⁵⁰Ibid., hlm 43

⁵¹Ibid., hlm 43.

berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Dan Pemerintah memberikan sebuah hubungan antara pihak pemerintah dan swasta dengan menciptakan sebuah aplikasi yang memfasilitasi interaksi Government to Business maupun Business to Government adalah sistem E-Procurement. Manfaatnya adalah :

Jadi manfaatnya ialah para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet, dengan adanya web tersebut maka lebih dimudahkan dalam proses apapun lalu proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi Term of Reference (TOR), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.

Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam E-Procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya) dengan proses tersebut maka lebih dimudahkan dalam pengadaan barang dan jasa. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek

regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait;dan lain sebagainya.



